

BAB I PENDAHULUAN

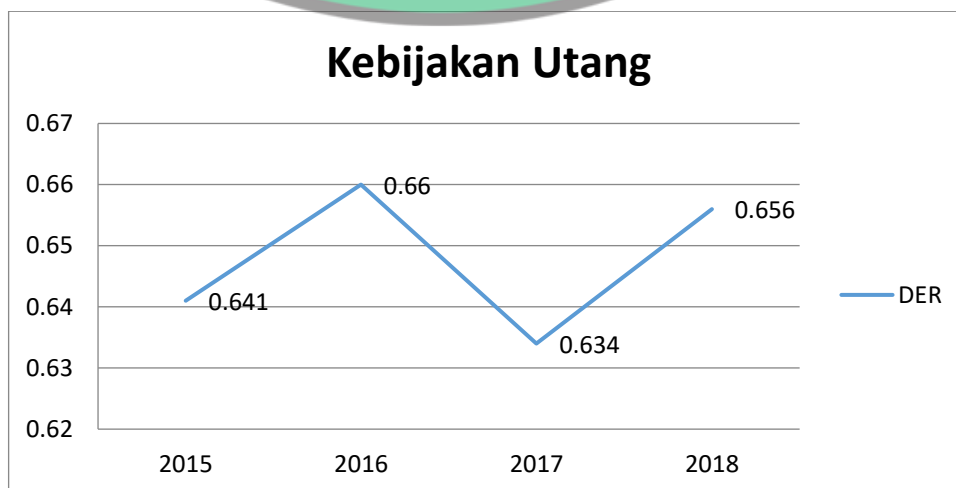
1.1. Latar Belakang

Pendanaan adalah faktor penentu bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ketersediaan dana yang cukup dan memadai untuk membiayai operasional perusahaan memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk berkembang dan bersaing (Lumapow, 2018). Keputusan pendanaan bersumber dari dana internal (dari dalam) maupun eksternal (dari luar). Sumber pendanaan internal dapat berasal dari laba ditahan perusahaan, sedangkan sumber pendanaan eksternal dapat diperoleh dari luar perusahaan seperti utang kepada kreditur (Safitri & Wulanditya, 2017). Perusahaan cenderung menggunakan dana eksternal atau melakukan utang jika membutuhkan dana besar sementara modal internal tidak mencukupi (Safitri & Wulanditya, 2017).

Utang merupakan sumber dana yang rentan dengan perubahan nilai perusahaan. Proporsi utang yang tinggi dapat berdampak pada peningkatan harga saham, tapi di moment tertentu dapat menurunkan nilai perusahaan karena laba lebih kecil dari pembiayaan operasional yang dikeluarkan (Anwar, 2019). Oleh karena itu, perusahaan memerlukan kebijakan utang. Menurut Brigham dan Houston (2014), kebijakan utang merupakan suatu kebijakan yang dilakukan manajemen memutuskan menggunakan dana utang untuk mendanai kebutuhan operasional perusahaan.

Pengambilan keputusan tentang utang membutuhkan pengawasan dan kontrol yang efektif untuk mengurangi risiko utang karena dalam kenyataannya perusahaan dituntut menentukan kebijakan utang yang optimal. Fenomena terkait kebijakan utang misalnya PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada tahun 2018 memiliki total tagihan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebesar Rp 498 miliar. Penundaan kewajiban tersebut karena perusahaan tidak mampu membayar kewajiban utang sehingga dapat mengakibatkan pailit (Azanella, 2019). Contoh lainnya pada perusahaan Sariwangi yang memiliki utang sebanyak 309,6 miliar dan tidak sanggup membayar cicilan utangnya. Perusahaan Nyonya Meneer bangkrut karena memiliki utang sebanyak 267 miliar karena tidak sanggup membayar utangnya (Katharina *et al.*, 2021).

Kasus di atas menunjukkan sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) cenderung menggunakan kebijakan utang. Berikut grafik kebijakan utang (DER) perusahaan manufaktur tahun 2015-2018.



Gambar 1.1
Perkembangan Utang Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2018

Sumber: www.idx.co.id (Data Diolah)

Gambar 1.1 di atas rata-rata DER perusahaan manufaktur selama tahun 2015-2018 terjadi fluktuatif. *Average* DER tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,66 dibandingkan tahun 2015 hanya sebesar 0,641, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,634, dan tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 0,656. Perubahan DER diindikasikan adanya perubahan naik turunnya jumlah ekuitas atau utang. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi utang dapat berubah tiap tahunnya tergantung keputusan agen dan prinsipal.

Fakta di atas menunjukkan bahwa penetapan kebijakan utang perusahaan harus dipertimbangkan secara lebih matang. Nilai DER yang semakin kecil atau di bawah nol (0) menunjukkan ekuitas perusahaan mengalami defisit, sehingga perusahaan biasanya menjual sebagian asetnya untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perusahaan kebijakan utang. Penelitian ini membatasi kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki investor institusi. Menurut Anwar (2019), kepemilikan institusional dapat pengawas kinerja manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Hubungan logisnya kepemilikan institusional yang kuat dapat mengontrol profit yang wajar dalam suatu periode, dengan demikian pemilik institusi dapat memprediksi perusahaan dimasa yang akan mendatang. Sejalan pendapat Sukmawardini & Ardiansari (2018) adanya proporsi kepemilikan institusional yang besar dapat meningkatkan kontrol ketat sehingga dapat menjamin kesejahteraan pemegang saham.

Hasil penelitian Safitri & Wulanditya (2017), menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan utang. Sejalan penelitian Nafisa *et al.* (2016) bahwa menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan kepemilikan institusional terhadap kebijakan utang pada perusahaan manufaktur periode 2011-2013. Sementara penelitian Nuraina (2012) menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemilikan institusional terhadap kebijakan utang pada perusahaan manufaktur periode Periode 2006-2008. Berbeda hasil penelitian Astuti (2014) dan Muslim dan Puspa (2019) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang.

Faktor penentu kedua terhadap kebijakan utang adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan rasio skala modal perusahaan yang terlihat dari nilai total aset, jumlah laba, total penjualan, beban pajak dan lain-lain (Brigham & Houston, 2014). Sebagian besar perusahaan berskala besar dalam membiayai operasional perusahaannya lebih memilih menggunakan utang, karena penggunaan utang akan mengurangi biaya bunga dalam insentif perpajakan sehingga menurunkan biaya utang yang sebenarnya. Selain itu, industri yang menggunakan utang diyakini oleh pasar bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang bagus (Lumapow, 2018). Perusahaan skala besar cenderung menggunakan utang karena kemudahan akses ke pasar modal. Tujuannya untuk mendapatkan sumber pendanaan secara eksternal. Kebijakan utang diambil karena memiliki profitabilitas lebih stabil (Sha, 2018).

Penelitian Hidayat dan Sari (2021), Nafisa *et al.* (2016), Sha (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan ukuran perusahaan

terhadap kebijakan utang, artinya semakin besar ukuran perusahaan maka penggunaan utang akan semakin meningkat. Sementara Lumapow (2018) menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang. Katharina *et al.* (2021), Nuraina (2012), Safitri dan Wulanditya (2017) menemukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang.

Adanya temuan penelitian yang belum konsisten maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali terkait dengan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan utang. Dengan mengambil judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Utang (Studi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan utang?
2. Apakah kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap kebijakan utang?
3. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap kebijakan utang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap kebijakan utang.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan institusional secara parsial terhadap kebijakan utang.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap kebijakan utang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pada pihak, diantaranya:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis
menambah wawasan keilmuan manajemen, khususnya keuangan, terutama dalam hal kebijakan utang.
2. Penelitian Selanjutnya
Sebagai referensi untuk melakukan pengembangan kajian dengan topik yang sama di masa akan datang, baik yang bersifat melanjutkan ataupun melengkapi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi investor
Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan investasi dengan mempertimbangkan kebijakan utang perusahaan terpilih.

2. Pihak Lain

Dapat dijadikan rujukan untuk pengambilan aturan atau kebijakan mengenai kebijakan utang perusahaan.

3. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen perusahaan dalam menilai dan mengevaluasi khususnya manajer keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya maupun dalam pengambilan keputusan *financial*.

